

SABTU PON, 28 FEBRUARI 2015
(9 JUMADILAWAL 1948)

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 3

IKADIN DIY GELAR DISKUSI PUBLIK Implementasi UU Desa Rawan Korupsi



KR-Franz Boedisukamanto

Pengurus Ikadin DIY audiensi di Redaksi KR, Jumat (27/2).

YOGYA (KR)- Potensi besar adanya penyimpangan penggunaan anggaran desa menyetuk DPD Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) DIY untuk menggelar Diskusi Publik bertemakan 'Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Implementasi UU Desa'. Diskusi akan berlangsung di Ruang Sidang Lantai 5, Gedung AR Fahrudin A Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (28/2) hari ini.

Bekerja sama dengan Fakultas Hukum UMY dan TaHER Foundation, Diskusi Publik ini akan menghadirkan Akademi Fakultas Hukum Isipol dan Ekonomi UMY, Advokat,

perangkat desa serta pemerintah daerah terkait penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan keuangan di daerah.

"Banyak permasalahan terkait anggaran yang mungkin muncul dengan ditetapkannya UU Desa. Untuk itu kami memandang penting membuat Diskusi Publik guna memberikan pemahaman pada pemerintah desa terkait pengelolaan anggaran yang benar," ujar Ketua DPD Ikadin DIY Moelyadi SH MH saat audiensi di Redaksi *Kedaulatan Rakyat*, Jumat (27/2).

Tiga materi penting dalam kaitannya dengan UU Desa

akan disampaikan Ketua DPP Ikadin Dr T Mulya Lubis SH LLM, Ketua Asosiasi Kepala Desa se DIY Bibit Rustanta SH serta Dekan Fakultas Hukum UMY dr Trisno Rahardjo SH M Hum.

Selain itu, akan digelar pula rapat pleno DPP Ikadin bersama dengan DPD Ikadin dari seluruh Indonesia yang salah satunya membahas soal RUU Advokat serta penguatan kepengurusan baru DPD Ikadin DIY.

"Ketiga acara ini nantinya akan ditindak lanjuti dengan menandatangani kesepahaman bersama atau MoU. Salah satunya tentang pendidikan," sambung Moelyadi. (*-2)-f